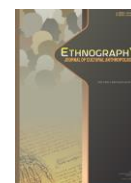




## Ethnography Journal of Cultural Anthropology

ISSN : 3031-1616 | DOI : 0.26887/ethnography.v3i14301  
Available online at : <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ethno>



### PENGARUH POLITIK IDENTITAS MELALUI AKSI MASA TERHADAP GENERASI MUDA DALAM PELAKSANAAN PILGUB DKI JAKARTA PERIODE 2017-2022

Difa Melani<sup>1</sup>, Thariqul Haq<sup>2</sup>, Silvia<sup>3</sup>, Riski<sup>4</sup>, Hafis<sup>5</sup>

Program Studi Antropologi Budaya Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Jl Bahder Johan Padang Panjang Sumatera Barat

E-mail: <sup>1</sup>difmelani@gmail.com, <sup>2</sup>thariqulhaq800@gmail.com, <sup>3</sup>silviajuita020602@gmail.com,

<sup>4</sup>rizqimahardika@gmail.com, <sup>5</sup>hafizardi012@gmail.com

Submitted:16-5-2024

Accepted:10-6-2024

Published:30-6-2024

#### A B S T R A K

*Eksplorasi politik identitas masih sering ditemukan melalui aksi massa, Hal ini akan membawa pengaruh negative terhadap kondisi sosial masyarakat termasuk generasi muda, sehingga pelaksanaan Pilgub 2017 yang aman dan demokratis menjadi tidak terwujud. Politik identitas merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, Tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah adanya eksploitasi politik identitas melalui aksi massa. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi seluruh pelaksana Pemilu, agar melaksanakan berbagai tindakan sistematis, sehingga pelaksanaan Pilgub 2017 dapat berlangsung dengan aman dan demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dapat memberikan usulan terkait dengan upaya penanganan eksploitasi politik identitas melalui aksi massa agar disintegrasi sosial di kalangan generasi muda dapat dicegah. Keberhasilan pelaksana Pemilu dalam menangani politik identitas melalui media sosial akan menghasilkan pelaksanaan pilgub 2017 yang aman dan demokratis, sehingga mampu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas.*

**Kata Kunci :** Politik identitas, aksi massa, generasi muda, pilgub.

#### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana bagi warga negara untuk menjalankan kedaulatan,, yakni dengan memberikan wewenang kepada individu, partai, atau lembaga tertentu untuk menjadi pemimpin atau wakilnya di parlemen. Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat. Demokrasi menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan , pembuat , dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui Lembaga perwakilan (Ellya Rosana : 2016). Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara

demokrasi, maka Pemilu merupakan satu keniscayaan, karena jadi tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga Pemilu telah menjadi motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Menurut Huntington (dalam Hamid : 2017) mengindentikkan pemilu dengan demokrasi, masyarakat Indonesia masih berada pada tahap lebih mengutamakan formalitas/prosedur semata. Seperti halnya yang disampaikan oleh Haynes, demokrasi di kebanyakan negara dunia ketiga lebih memperlihatkan sisi formalitas yang terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan dan lebih khusus lagi terfokus pada pemilihan umum. Pemilu menjadi perwujudan yang nyata dari demokrasi

prosedural. Dengan begitu Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat substansial, sehingga harus bisa diselenggarakan secara aman dan demokratis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sharma, et al (2010) yang difasilitasi IFES ( Internasional Foundation for Electoral Systems) mengenai pemilu terhadap masyarakat Indonesia menghasilkan beberapa temuan penting diantaranya yaitu, terkait dengan pengaruh nilai-nilai dan norma terhadap demokrasi, (62%) orang Indonesia mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh penting terhadap politik, yang mempengaruhi keputusan sampai batas tertentu (44%) atau terhadap sebagian besar keputusan mereka (18%) dan sisanya (38%) mengatakan agama tidak berpengaruh, dari data diatas dapat kita lihat bahwa Identitas sangat berpengaruh didalam perpolitikan Indonesia, sehingga ada istilah menarik yang tumbuh subur di Indonesia yaitu politik Identitas.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 ini dapat berjalan dengan aman dan demokratis jika diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, Sehingga pelaksanaannya sesuai dengan amanat undang-undang, yakni UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Selain itu, salah satu tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan Pilgub 2017 yang aman dan demokratis ialah eksistensi serta kesigapan aparat penegak hukum dan pelaksana Pemilu, yakni mampu mencegah terjadinya gejolak masyarakat dari seluruh golongan/generasi tatkala semua rangkaian tahapan Pemilu terjadi (Kumolo, 2018).

Dalam pemilihan gubernur ini yang menjadi DPT, DPTb tidak hanya orang dewasa saja, namun didalamnya banyak generasi muda yang ikut berpartisipasi menyumbangkan suaranya untuk pembangunan negeri ini. Generasi muda merupakan kelompok, golongan, angkatan, kaum muda yang hidup dalam jangka waktu tertentu dan mempunyai tugas untuk melanjutkan pembangunan bangsanya. Peran generasi muda dalam partisipasi

politik cukup tinggi, yaitu dengan melihat generasi muda memiliki peran penting sebagai bentuk utama peran merubah negara menjadi lebih baik. Partisipasi politik generasi muda didukung dengan adanya faktor modernisasi sarana dan prasarana, kesetaraan kelas sosial, intelektualitas generasi muda, konflik elite politik yang memerlukan perhatian publik, hingga keputusan politik yang dinilai penting harus terlibat dalam bagian penyelesaian masalahnya (Muhammad Khakim: 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaruh politik identitas melalui aksi massa terhadap generasi muda

Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi "orang asli" yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi "orang pendatang" yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi, alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya" (M. Haboddin: 2012). Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) yang sering kali diberlakukan tidak adil. Generasi muda merupakan generasi yang akan menentukan mau dibawa kemana negeri ini. Dengan begitu, generasi muda sering kali melakukan aksi-aksi yang tidak pandang bulu. Mereka akan melakukan apa saja supaya keinginan mereka tercapai, apalagi ini menyangkut pemerintahan. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa. Baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika, para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa, karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktifitas pendidikan yang terbilang tingkatannya yang paling tinggi. Jika moral mahasiswa buruk maka nama bangsa juga

akan ikut tercemar, jika cara berfikir mahasiswa kearah yang positif maka Indonesia akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang akan mencuitkan nama Indonesia dibelahan dunia maka mahasiswa harus bisa membawa NKRI kedalam perubahan yang lebih baik

## B. Dampak eksploitasi politik identitas melalui aksi massa terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat

Eksplorasi diartikan sebagai satu hal tindakan untuk memeralat individu lainguna tujuan kepentingan sendiri (Emirzon, 2007). Seiring dengan masih adanya praktik politik identitas, yang mana praktik tersebut kian berkembang modusnya karena salah satunya adanya aksi massa. Dalam pilgub 2017, factor utama yang menjadi penunjang adanya aksi massa ialah karena adanya sentiment agama DKI Jakarta yang menguat pada pilgub tahun 2012 pada saat front pembela islam dan Gerakan masyarakat Jakarta menolak kehadiran Basuki untuk memimpin DKI Jakarta, penolakan ini didasari oleh perbeedaan identitas agama yang dimiliki oleh Basuki . Sentimen agama adalah hal yang menakutkan pada situasi dan lingkungan pergaulan sosial , hubungan antar umat beragama, pengangkata dan pemilhan pemimpin, khususnya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Beberapa contoh aksi massa yang terindikasi mengeksploitasi politik identitas dapat dilihat pada gambar-gambar berikut :



Gambar 1. Demonstrasi Tangkap Ahok  
(Sumber: Internet)

Mencermati gambar 1 di atas, maka dapat dilihat bahwa , generasi muda sangat

antusias untuk melakukan aksi unjuk rasa karena mereka tidak terima Ahok sudah menistakan agama Islam.



Gambar 2. Demonstrasi Tangkap Ahok  
(Sumber: Internet)



Gambar 3. Demonstrasi Tangkap Ahok  
(Sumber: Internet)

Mencermati gambar 3 diatas, maka dapat dilihat bahwa , massa komite independent pemantau pemilu (KIPP) melakukan aksi damai terkait pilkada DKI Jakarta 2017. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pilkada serta mendesak KPU dan Bawaslu untuk lebih professional dalam menjalankan tugasnya .

Berdasarkan beberapa contoh gambar di atas (Gambar 1-3 ), sebagai sampel dari masih adanya eksploitasi politik identitas melalui aksi massa .

### 3. Upaya Penanganan Eksploitasi Politik Identitas melalui aksi massa oleh Pelaksana Pemilu

Upaya penanganan eksploitasi politik identitas perlu dilaksanakan secara bertahap serta cermat, karena politik identitas dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat positif berarti dapat jadi dorongan untuk mengakui serta mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai tingkat mengakui predikat

keistimewaan tertentu, karena alasan yang bisa dipahami secara historis maupun logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antarkelompok satu dengan yang lainnya, seperti dominasi mayoritas atas minoritas (Bagir, 2011) Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya eksploitasi politik identitas melalui aksi massa yaitu para aparat penegak hukum harus langsung mendisiplinkan para paslon yang melanggar / menghina agama, ras, suku dan lain-lain yang akan mendatangkan petaka.

## KESIMPULAN

Politik identitas menjadi sangat subur dibangun dalam bentuk interkasi simbolik untuk memobilisasi dukungan massa. Pembentukan dan penggunaan politik identitas dalam pilkada DKI Jakarta 2017 memanfaatkan kondisi kondisi yang terjadi diakar rumput untuk kemudian dipergunakan Kembali sebagai instrument kekuatan dalam merebut kekuasaan , pemebentukan ini diawali dengan serangkaian aksi dan reaksi penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama selaku gubernur DKI Jakarta menjelang pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kumolo, Tjahjo. 2018. Ini Syarat Pemilu yang Sukses, Aman, dan Demokratis.
- Kumolo, Tjahjo. 2018. Ini Syarat Pemilu yang Sukses, Aman, dan Demokratis.
- Bagir, Zainal Abidin. 2011. Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia. Mizan dan CRCS. Yogyakarta
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 12(1), 37-53.
- Khakim, M. S. (2023). Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 4(1), 98-116.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. Jurnal Studi Pemerintahan.